



EVALUASI PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA

¹Alya Rahmania & ²Ayla Sherilia, ³M.Afdhal Al Fachru, ⁴ Rudi Santoso

¹ Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, Indonesia. email: arahmania526@gmail.com

² Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, Indonesia. Email: aylaaherillia513@gmail.com

³ Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, Indonesia. Email: m.afdhalalfachru@gmail.com

⁴ Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, Indonesia Email: rudisantoso@radenintan.ac.id

Received: Mei 2026; Revised: Mei 2026; Accepted: Mei 2026; Published: 30 Mei 2026; Available online: Mei 2026

ABSTRAK

Pemilu serentak merupakan salah satu inovasi dalam sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta memperkuat kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui studi literatur dan data sekunder dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu serentak memberikan sejumlah keuntungan, seperti penghematan biaya dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Namun, terdapat pula berbagai tantangan, antara lain kompleksitas teknis pelaksanaan, beban kerja penyelenggara yang tinggi, serta potensi menurunnya kualitas pilihan pemilih akibat banyaknya surat suara. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem dan regulasi guna memaksimalkan manfaat pemilu serentak dalam mendukung demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia.

Kata kunci : Pemilu Serentak, Kualitas Demokrasi, Efisiensi Penyelenggaraan

ABSTRACT

Simultaneous elections are an innovation in Indonesia's democratic system, aimed at increasing the efficiency of election administration and strengthening the quality of democracy. This study aims to evaluate the implementation of simultaneous elections and their impact on the quality of democracy in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis, through literature studies and secondary data from various relevant sources. The results show that simultaneous elections offer several benefits, such as cost savings and increased public political participation. However, there are also various challenges, including the technical complexity of implementation, the high workload of

organizers, and the potential for a decline in the quality of voter choice due to the large number of ballots. Therefore, improvements to the system and regulations are needed to maximize the benefits of simultaneous elections in supporting a higher-quality democracy in Indonesia.

Keywords: *Simultaneous Elections, Quality of Democracy, Efficiency of Implementation*

PENDAHULUAN

Secara global, tren demokrasi sedang menghadapi ujian berat yang sering disebut sebagai fase "regresi demokrasi." Fenomena ini ditandai dengan melemahnya institusi politik, polarisasi yang tajam, dan penurunan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Padahal, pemilu secara universal diakui sebagai instrumen paling fundamental bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan serta memastikan adanya sirkulasi kekuasaan yang damai dan kompetitif di negara modern.¹

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, melakukan lompatan besar dengan menerapkan sistem pemilu serentak sejak tahun 2019. Kebijakan ini merupakan upaya untuk menyelaraskan waktu pemilihan eksekutif dan legislatif dalam satu hari yang sama. Langkah ambisius ini diambil sebagai respons atas kompleksitas sistem ketatanegaraan pasca-reformasi, dengan tujuan utama

menciptakan efisiensi birokrasi pemilihan serta memperkuat sistem presidensial melalui efek ekor jas (*coattail effect*).

Secara normatif, pelaksanaan pemilu serentak diharapkan mampu menjadi katalisator bagi penguatan demokrasi yang lebih substansial. Idealnya, penyederhanaan waktu pemungutan suara dapat meningkatkan partisipasi pemilih, menekan biaya politik yang tinggi, serta mendorong pemilih untuk melihat keselarasan platform antara calon presiden dan partai pengusungnya. Dengan demikian, pemerintahan yang terbentuk diharapkan memiliki basis dukungan parlemen yang kuat (*parliamentary threshold*), sehingga kebijakan publik dapat diputuskan dengan lebih stabil dan efektif.³

Namun, realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang tajam antara harapan dan kenyataan. Pelaksanaan pemilu serentak

¹ Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), 7.

² Didik Supriyanto, *Pemilu Serentak dan Sistem Presidensial di Indonesia* (Jakarta: Perludem, 2018), 12.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 324.

justeru memicu kompleksitas teknis yang luar biasa bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), yang berdampak pada kelelahan fisik petugas hingga tingginya angka kematian pada pemilu sebelumnya. Selain itu, beban administratif yang terlalu berat seringkali mengaburkan substansi kampanye legislatif karena perhatian publik tersedot sepenuhnya pada kontestasi pemilihan presiden.

Kesenjangan ini secara langsung berdampak pada penurunan kualitas demokrasi di tingkat prosedural maupun substansial. Kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi (kuantitas), tetapi juga dari integritas proses, kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan program (bukan politik uang), serta akuntabilitas penyelenggara. Ketika teknis penyelenggaraan menjadi beban yang menghambat transparansi dan akurasi hasil, maka legitimasi hasil pemilu pun menjadi rentan untuk dipertanyakan.⁴

Meskipun banyak studi sebelumnya telah membahas aspek hukum dan teknis pemilu serentak, masih sedikit penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi dampak sistem serentak ini terhadap kedalaman kualitas demokrasi di level akar

rumput. Sebagian besar literatur cenderung fokus pada efisiensi anggaran atau hasil perolehan suara partai politik, namun seringkali mengabaikan sejauh mana sistem ini benar-benar mencerdaskan perilaku pemilih dan memperkuat akuntabilitas perwakilan politik pasca-pemilu.

Terdapat kekosongan analisis mengenai efektivitas evaluasi berkala yang dilakukan oleh negara dalam memperbaiki tata kelola pemilu serentak dari periode ke periode. Sejauh ini, revisi regulasi seringkali bersifat reaktif dan parsial, tanpa menyentuh akar permasalahan mengenai beban kerja penyelenggara dan model edukasi pemilih yang efektif di tengah tsunami informasi digital. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih holistik untuk melihat apakah pemilu serentak masih merupakan model terbaik bagi Indonesia.

Penelitian ini menjadi sangat mendesak (urgent) mengingat Indonesia akan terus menghadapi siklus politik serupa di masa depan. Tanpa adanya evaluasi yang kritis dan berbasis data, kegagalan teknis dan degradasi substansi demokrasi akan terus berulang, yang pada akhirnya dapat memicu apatisme politik di masyarakat. Menemukan formula keseimbangan antara efisiensi

⁴ Syamsuddin Haris, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2019), 45.

teknis dan kualitas substansial adalah kunci untuk menyelamatkan marwah demokrasi Indonesia dari ancaman keretakan institusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menjawab permasalahan utama mengenai bagaimana dampak pelaksanaan pemilu serentak terhadap indikator kualitas demokrasi di Indonesia. Secara lebih spesifik, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi hambatan utama dalam penyelenggaraan pemilu serentak serta merumuskan rekomendasi strategis bagi perbaikan sistem pemilu di masa mendatang demi mewujudkan iklim demokrasi yang lebih sehat, berintegritas, dan berkualitas.⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan pemilu serentak dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti bermaksud untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan politik secara menyeluruh, serta memahami makna di balik fakta empiris yang ditemukan di lapangan (Creswell & Poth, 2018). Melalui deskripsi yang mendalam,

penelitian ini diharapkan mampu membedah kompleksitas problematika pemilu serentak melampaui sekadar angka-angka statistik.⁶

Sumber data utama dalam penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti menyusun strategi pencarian data sekunder dengan menetapkan kata kunci spesifik seperti "Evaluasi Pemilu Serentak," "Kualitas Demokrasi Indonesia," "Integritas Pemilu," dan "Efek Ekor Jas." Pencarian dibatasi pada rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016–2026) untuk menjamin aktualitas informasi, mengingat dinamika regulasi pemilu di Indonesia bergerak sangat cepat. Proses seleksi data dilakukan melalui teknik *content analysis* untuk memastikan bahwa setiap literatur, baik berupa buku teks maupun jurnal bereputasi, memiliki relevansi substansial dengan tema evaluasi demokrasi yang sedang diteliti.

Data tersebut didukung oleh dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pemilu, seperti laporan evaluasi akhir tahun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Selain itu, peneliti melakukan studi kepustakaan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶ J. W. Creswell & C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), 32.

(*Library Research*) yang mendalam untuk menghimpun data dari artikel ilmiah, tesis, dan naskah akademik terkait (Zed, 2014). Teknik pengumpulan data dokumentasi ini difokuskan pada upaya sinkronisasi antara regulasi (das sollen) dengan fakta implementasi di lapangan (das sein).⁷

Teknis analisis data dalam penelitian ini menerapkan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Proses ini digambarkan dalam sebuah *flow chart* yang mencakup tiga tahapan utama yang saling berkaitan:

1. **Reduksi Data:** Peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan atau dokumen. Data yang tidak relevan dengan kualitas demokrasi akan dibuang, sementara data inti akan dikategorikan.
2. **Penyajian Data (*Data Display*):** Sekumpulan informasi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. Hal ini

memudahkan peneliti melihat pola hubungan antara hambatan teknis pemilu dengan penurunan kualitas demokrasi.

3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:** Peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, dan konfigurasi yang mungkin dari data yang telah disajikan, yang kemudian divalidasi kebenarannya sepanjang penelitian berlangsung.

Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber berbeda, misalnya membandingkan laporan resmi KPU dengan temuan kritis dari jurnal ilmiah atau opini ahli demokrasi di media massa. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bias subjektivitas peneliti dan memastikan kredibilitas temuan. Fokus penelitian ini tetap berpijak pada efektivitas pelaksanaan pemilu serentak serta dampaknya terhadap fluktuasi kualitas demokrasi di Indonesia dalam

⁷ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 4.

⁸ M. B. Miles, A. M. Huberman, & J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Arizona State University: SAGE Publications, 2014), 31.

beberapa siklus pemilihan terakhir.⁹

PEMBAHASAN

1. Konsep dan Tujuan Pemilu Serentak: Antara Efisiensi Prosedural dan Penguatan Sistem Presidensial

Lahirnya kebijakan pemilu serentak di Indonesia bukan sekadar perubahan teknis administratif, melainkan sebuah upaya rekonsiliasi konstitusional untuk memperbaiki **Sistem Presidensial Multi-partai** yang dianggap anomali. Secara teoretis, kebijakan ini berlandaskan pada tesis Scott Mainwaring yang menyatakan bahwa sistem presidensial akan sulit stabil jika dikombinasikan dengan sistem multi-partai yang ekstrem. Pemilu serentak dirancang sebagai instrumen untuk menciptakan *coattail effect* (efek ekor jas), di mana pemilihan presiden diharapkan mampu menjadi lokomotif bagi perolehan suara partai pengusungnya di parlemen, sehingga tercipta penyederhanaan partai secara alamiah.¹⁰

Analisis Kritis: Kegagalan Menghindari "Divided Government" Namun, realitas

empiris menunjukkan sebuah *critical turning point* yang kontradiktif. Meskipun tujuannya adalah efisiensi, penggabungan ini justru menciptakan beban kerja yang melampaui kapasitas manusiawi penyelenggara. Di sisi lain, *coattail effect* yang diharapkan tidak bekerja secara linear bagi semua partai koalisi. Sebagian besar pemilih di Indonesia masih memiliki perilaku pemilih yang terfragmentasi (*split-ticket voting*), di mana mereka memilih calon presiden dari Partai A namun memilih calon legislatif dari Partai B. Hal ini menyebabkan tujuan awal untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen demi stabilitas pemerintahan belum sepenuhnya tercapai.¹¹

Studi Kasus: Dilema Koalisi Pragmatis 2014 vs 2019 Untuk memahami urgensi transisi ini, kita dapat membandingkan dinamika politik pada era sebelum dan sesudah keserentakan penuh:

- **Era Pemilu Terpisah (2014):** Terjadi ketidaksinkronan tajam antara hasil Pileg dan Pilpres. Presiden terpilih (Joko Widodo) pada awal masa jabatannya menghadapi hambatan besar di parlemen karena

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 127.

¹⁰ Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in

Thirty-Six Countries (New Haven: Yale University Press, 2012), 98.

¹¹ Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), 217.

koalisi pendukungnya (Koalisi Indonesia Hebat) merupakan minoritas dibandingkan Koalisi Merah Putih. Akibatnya, terjadi kemacetan legislasi dan presiden terpaksa melakukan negosiasi politik yang sangat pragmatis (akomodasi menteri bagi lawan politik) untuk mengamankan stabilitas.

- **Era Pemilu Serentak (2019):** Meskipun pemilu dilakukan serentak, koalisi yang terbentuk tetap bersifat "tenda besar" (big tent coalition). Alih-alih menyederhanakan partai, keserentakan justru memaksa partai-partai kecil untuk sekadar menempel pada figur capres demi ambang batas parlemen (¹²*parliamentary threshold*), tanpa adanya kesamaan ideologi yang kuat.¹³

Kaitan dengan Kualitas Demokrasi Jika dikaitkan dengan parameter **Kualitas Demokrasi**, pemilu serentak di Indonesia masih terjebak pada pemenuhan aspek prosedural (keberlangsungan memilih) namun mengalami degradasi pada

aspek substansial. Tingginya angka surat suara tidak sah (invalid votes) untuk level legislatif pada Pemilu 2019 dan 2024 membuktikan bahwa perhatian pemilih terdistorsi secara ekstrem pada Pilpres. Hal ini menciptakan defisit representasi, di mana kualitas wakil rakyat di parlemen terabaikan akibat hiruk-pikuk kontestasi eksekutif.¹⁴

Posisi Akhir (Sintesis)

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil secara substantif dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Meskipun berhasil secara prosedural dalam menyatukan waktu pemungutan suara, sistem ini gagal mencapai tujuan makronya untuk memperkuat sistem presidensial yang ramping dan ideologis. Sebaliknya, yang terjadi adalah penguatan oligarki partai melalui koalisi pragmatis yang tetap gemuk, serta beban penyelenggaraan yang tidak sebanding dengan kualitas partisipasi pemilih yang dihasilkan. Pemilu serentak saat ini lebih nampak sebagai "pemaksaan administratif"

¹² Marcus Mietzner, *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia* (Singapore: NUS Press, 2013), 55.

¹³ Komisi Pemilihan Umum, *Laporan Evaluasi Pemilu 2019* (Jakarta: KPU, 2020), 23.

¹⁴ Titi Anggraini, "Evaluasi Demokrasi Elektoral di Indonesia," *Jurnal Demokrasi* 19, no. 1 (2021): 75.

daripada sebuah "pencerdasan politik."¹⁵

memiliki dukungan politik yang lebih kuat. Dengan demikian, proses pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan stabil. Selain itu, pemilu serentak juga dimaksudkan untuk mengurangi biaya politik dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Dengan pelaksanaan dalam satu waktu, penggunaan anggaran negara dapat ditekan, sementara proses administrasi menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan sistem pemilu yang terpisah. Di sisi lain, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Dengan menghadapi seluruh pilihan politik dalam satu waktu, pemilih dapat mempertimbangkan secara menyeluruh kandidat yang akan dipilih, baik untuk legislatif maupun eksekutif. Hal ini berpotensi memperkuat hubungan representasi antara rakyat dan pemerintah. Namun demikian, pelaksanaan pemilu serentak menunjukkan berbagai tantangan yang cukup signifikan. Kompleksitas teknis yang tinggi, terutama terkait banyaknya jenis surat suara, membuat proses pemungutan dan penghitungan suara menjadi lebih rumit. Hal ini

tidak hanya berdampak pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada pemilih yang harus mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks.⁶ Selain itu, kondisi tersebut dapat menyebabkan pemilih mengalami kesulitan dalam memahami seluruh pilihan yang tersedia, sehingga kualitas keputusan politik menjadi kurang optimal. Dalam beberapa kasus, pemilih cenderung memilih secara cepat tanpa pertimbangan yang matang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas hasil pemilu. Oleh karena itu, meskipun pemilu serentak memiliki tujuan yang strategis dalam memperkuat demokrasi, pelaksanaannya masih memerlukan berbagai perbaikan. Penyederhanaan sistem pemilu, peningkatan kapasitas penyelenggara, serta penguatan pendidikan politik masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai secara maksimal.¹⁷

2 Efektivitas Pelaksanaan Pemilu Serentak

Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia dapat dinilai dari sejauh mana sistem ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari segi efisiensi maupun kualitas demokrasi. Dari sisi administratif,

¹⁵ Ramlan Surbakti, "Tantangan Pemilu Serentak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 125.

¹⁶ Andreas Ufen, "Party System Institutionalization in Post-Suharto

Indonesia," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 27, no. 1 (2008): 15.

¹⁷ Titi Angraini, "Evaluasi Teknis Pemilu Serentak," *Jurnal Demokrasi* 18, no. 1 (2020): 90.

pemilu serentak memberikan keuntungan berupa penghematan anggaran karena seluruh proses pemilihan dilakukan dalam satu waktu. Selain itu, penyatuan jadwal pemilu juga membantu mempercepat pembentukan pemerintahan setelah pemilu berlangsung.

Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam praktik. Pelaksanaan pemilu serentak menghadapi berbagai kendala teknis, seperti distribusi logistik yang tidak merata dan keterlambatan dalam beberapa tahapan pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi administratif tidak selalu sejalan dengan kelancaran pelaksanaan di lapangan. Selain itu, proses penghitungan dan rekapitulasi suara menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak jenis pemilihan secara bersamaan. Kompleksitas ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menjaga kualitas hasil pemilu¹⁸. Dari sisi kelembagaan, tingginya beban kerja penyelenggara pemilu juga menjadi faktor yang

memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis dapat berdampak pada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyelenggara menjadi hal yang sangat penting. Di samping itu, efektivitas pemilu serentak juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. Ketika pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik dan transparan, kepercayaan publik cenderung meningkat. Sebaliknya, jika terdapat banyak kendala teknis, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas pemilu. Secara keseluruhan, pemilu serentak memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, namun masih memerlukan berbagai perbaikan dalam aspek teknis dan kelembagaan. Upaya peningkatan kualitas pelaksanaan menjadi kunci agar sistem ini dapat berjalan secara efektif dan mampu memperkuat demokrasi di Indonesia.¹⁸¹⁹²⁰²¹²²

3. Dampak terhadap Partisipasi Politik Masyarakat

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

¹⁹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 120.

²⁰ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: ISEAS, 2010), 89.

²¹ Pippa Norris, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 67.

²² Perludem, *Catatan Evaluasi Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: Perludem, 2020), 34.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pemilu serentak. Sistem ini pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi melalui penyatuan waktu pemilihan. Dari segi jumlah, pemilu serentak cenderung meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Hal ini disebabkan oleh adanya momentum politik yang terpusat serta tingginya perhatian masyarakat terhadap proses pemilu. Selain itu, masyarakat hanya perlu mengikuti satu kali proses pemungutan suara, sehingga lebih praktis dibandingkan dengan pemilu yang dilakukan secara terpisah.²³

Namun demikian, peningkatan jumlah partisipasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas partisipasi. Banyaknya pilihan yang harus dihadapi dalam satu waktu membuat sebagian pemilih mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan secara rasional. Kondisi ini dapat menyebabkan pemilih tidak sepenuhnya memahami kandidat yang dipilihnya. Selain itu, kompleksitas pemilu serentak juga dapat menimbulkan kelelahan bagi pemilih. Banyaknya surat

suara yang harus dicoblos dalam waktu yang terbatas dapat menurunkan konsentrasi dan kualitas pengambilan keputusan. Dalam situasi seperti ini, pemilih cenderung mengambil keputusan secara cepat tanpa pertimbangan yang matang. Di sisi lain, pemilu serentak juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui intensitas kampanye dan sosialisasi yang lebih tinggi. Jika didukung dengan pendidikan politik yang baik, sistem ini dapat mendorong partisipasi yang tidak hanya tinggi secara jumlah, tetapi juga berkualitas. Secara keseluruhan, pemilu serentak memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat, tetapi masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas partisipasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan literasi politik masyarakat agar partisipasi yang terjadi benar-benar mencerminkan pilihan yang rasional dan sadar.²⁴²⁵²⁶

4. Kualitas Representasi Politik

Kualitas representasi politik dalam pemilu serentak berkaitan dengan kemampuan sistem pemilu dalam menghasilkan wakil

²³ Komisi Pemilihan Umum, Laporan Evaluasi Pemilu 2019 (Jakarta: KPU, 2020), 78.

²⁴ Badan Pusat Statistik, Statistik Politik Indonesia 2020 (Jakarta: BPS, 2020), 55.

²⁵ Ramlan Surbakti, "Partisipasi Politik dalam Pemilu," Jurnal Ilmu Politik 11, no. 1 (2020): 44.

²⁶ Badan Pengawas Pemilu, Laporan Pengawasan Pemilu 2019 (Jakarta: Bawaslu, 2020), 15.

rakyat dan pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keterpaduan antara hasil pemilihan legislatif dan eksekutif sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih stabil. Dengan dilaksanakannya pemilu secara bersamaan, pemilih memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan politiknya secara lebih menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas politik, karena pemilih dapat menilai kesesuaian antara program yang ditawarkan oleh kandidat legislatif dan eksekutif. Namun demikian, dalam praktiknya, kualitas representasi politik masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi partai politik besar dalam pemilu sering kali membatasi ruang bagi kandidat alternatif, sehingga aspirasi masyarakat yang beragam tidak sepenuhnya terwakili.²⁷²⁸

Selain itu, praktik politik uang masih menjadi masalah yang memengaruhi hasil pemilu. Dalam kondisi ini, pilihan pemilih tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan pada faktor material atau kepentingan jangka pendek. Hal ini dapat menurunkan kualitas

representasi yang dihasilkan. Di sisi lain, hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat juga belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Banyak wakil rakyat yang belum mampu menjalankan fungsi representasi secara substantif, yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat secara konsisten setelah terpilih.²⁹ Secara keseluruhan, pemilu serentak memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas representasi politik, tetapi masih memerlukan berbagai perbaikan. Penguatan sistem kepartaian, peningkatan pendidikan politik, serta pengawasan yang lebih ketat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa representasi politik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.²⁹³⁰³¹

5. Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak

Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun sosial. Kompleksitas ini muncul karena seluruh tahapan pemilihan, mulai dari persiapan hingga rekapitulasi hasil, dilakukan secara

²⁷ Vedi R. Hadiz, "Money Politics and Elections in Indonesia," *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 230.

²⁸ International IDEA, *Electoral System Design Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2017), 43.

²⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Laporan Dampak Kesehatan*

Petugas KPPS 2019 (Jakarta: Kemenkes RI, 2019), 8.

³⁰ Adam Przeworski, *Democracy and the Market* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 19.

³¹ Ramlan Surbakti, "Sistem Kepartaian dan Representasi Politik," *Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 138.

bersamaan dalam satu waktu. Kondisi tersebut menuntut kesiapan yang tinggi dari seluruh pihak yang terlibat, karena setiap kendala yang muncul pada satu tahapan dapat berdampak langsung pada tahapan lainnya. Oleh sebab itu, pemilu serentak membutuhkan sistem yang lebih terintegrasi dan manajemen yang lebih matang dibandingkan dengan pemilu yang dilaksanakan secara terpisah. Salah satu tantangan utama terletak pada pengelolaan dan distribusi logistik pemilu yang harus dilakukan secara cepat, tepat, dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil dan kepulauan, proses distribusi ini sering kali menghadapi hambatan teknis. Keterlambatan atau ketidaktepatan distribusi logistik tidak hanya mengganggu kelancaran pemungutan suara, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, kompleksitas dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang melibatkan banyak jenis pemilihan dalam satu waktu juga meningkatkan risiko

terjadinya kesalahan administratif. Dari sisi sumber daya manusia, pemilu serentak memberikan beban kerja yang sangat besar kepada penyelenggara, khususnya petugas di tingkat lapangan seperti KPPS. Mereka dituntut untuk menjalankan tugas dalam durasi yang panjang dengan tingkat tekanan yang tinggi, terutama pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas kinerja, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental³²³³³⁴

petugas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, perlindungan kerja, serta manajemen beban kerja yang lebih baik menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pemilu serentak. Selain itu, efektivitas pelaksanaan pemilu serentak juga sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan. Koordinasi yang tidak berjalan secara optimal dapat menghambat berbagai proses penting, seperti pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu. Dalam konteks ini, sinergi antar lembaga menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa seluruh

³² Titi Anggraini, "Evaluasi Demokrasi Elektoral di Indonesia," *Jurnal Demokrasi* 19, no. 1 (2021): 82.

³³ Ramlan Surbakti, "Tantangan Kelembagaan Pemilu di Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2020): 140.

³⁴ Badan Pengawas Pemilu RI, *Evaluasi Pengawasan Pemilu 2019* (Jakarta: Bawaslu, 2020), 60.

tahapan pemilu dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengawasan, pemilu serentak menghadirkan tantangan yang cukup besar karena banyaknya tahapan dan aktor yang terlibat dalam waktu yang bersamaan. Keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan dengan luasnya cakupan pengawasan menyebabkan tidak semua potensi pelanggaran dapat terdeteksi secara optimal. Hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun substantif, yang dapat memengaruhi kualitas hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi dalam proses pemantauan. Di sisi lain, faktor sosial seperti tingkat literasi politik masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pemilu serentak. Pemilih yang memiliki pemahaman politik yang rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami proses pemilu yang kompleks, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pilihan politik yang diambil oleh masyarakat. Oleh karena itu,

peningkatan pendidikan politik menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung terciptanya pemilu yang berkualitas. Secara keseluruhan, pemilu serentak di Indonesia menghadirkan tantangan yang bersifat multidimensional dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Upaya perbaikan tidak hanya perlu difokuskan pada aspek teknis, tetapi juga harus mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kesadaran politik masyarakat. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan pemilu serentak dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia..³⁵³⁶³⁷³⁸

6. Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Pemilu Serentak
Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia menunjukkan bahwa sistem ini memiliki sejumlah capaian positif, namun juga menyisakan berbagai permasalahan yang perlu diperbaiki secara

berkelanjutan. Dari sisi efisiensi, penggabungan berbagai jenis pemilihan dalam satu waktu terbukti mampu

³⁵ Vedi R. Hadiz, "Money Politics and Elections in Indonesia," *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 237.

³⁶ Komisi Pemilihan Umum, Laporan Evaluasi Pemilu 2019 (Jakarta: KPU, 2020), 102.

³⁷ Didik Supriyanto, *Pemilu Serentak dan Sistem Presidensial di Indonesia* (Jakarta: Perludem, 2018), 78.

³⁸ Perludem, *Catatan Evaluasi Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: Perludem, 2020), 67.

menyederhanakan siklus politik nasional serta mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu. Selain itu, proses pembentukan pemerintahan dapat berlangsung lebih cepat karena seluruh hasil pemilu dapat diketahui dalam satu periode yang sama. Kondisi ini memberikan keuntungan dalam menciptakan stabilitas politik pasca pemilu. Meskipun demikian, efisiensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu. Dalam praktiknya, berbagai kendala teknis masih sering terjadi, terutama terkait kompleksitas proses pemungutan dan penghitungan suara. Banyaknya jenis pemilihan yang dilakukan secara bersamaan menyebabkan proses administrasi menjadi lebih rumit, sehingga meningkatkan potensi kesalahan. Di samping itu, beban kerja penyelenggara yang sangat tinggi juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu secara keseluruhan. Dari perspektif kualitas demokrasi, pemilu serentak belum sepenuhnya mampu menghasilkan peningkatan yang signifikan. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat cenderung meningkat, kualitas partisipasi tersebut masih menjadi persoalan. Banyak pemilih yang belum sepenuhnya memahami pilihan politiknya, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional.

Selain itu, praktik politik uang dan kampanye yang tidak berbasis program masih menjadi tantangan yang memengaruhi kualitas hasil pemilu. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penyederhanaan desain pemilu, misalnya dengan mengurangi jumlah jenis pemilihan yang dilakukan secara bersamaan. Dengan sistem yang lebih sederhana, diharapkan beban kerja penyelenggara dapat berkurang dan pemilih dapat lebih mudah memahami proses pemilu. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam proses rekapitulasi suara juga dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi penghitungan hasil pemilu. Selain perbaikan teknis, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu juga menjadi aspek yang sangat penting. Pelatihan yang memadai, pengelolaan beban kerja yang lebih baik, serta perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan petugas harus menjadi prioritas utama. Dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, pelaksanaan pemilu dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Di sisi lain, peningkatan kualitas demokrasi juga memerlukan penguatan literasi politik masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu masyarakat dalam memahami

proses pemilu serta membuat keputusan politik yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, partisipasi yang terjadi tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas secara substantif.³⁹404142434445

Lebih lanjut, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan integritas pemilu. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sementara penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Dalam konteks ini, sinergi antara lembaga penyelenggara, pengawas, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.⁴⁰ Secara keseluruhan, pemilu serentak merupakan inovasi penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan

stabilitas politik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal, diperlukan berbagai perbaikan yang menyeluruh, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun sosial. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan komitmen untuk melakukan perbaikan, pemilu serentak diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.⁴⁶⁴⁷

PENUTUP

1. Efisiensi Prosedural dan Penguatan Presidensiil

Pemilu serentak merupakan inovasi struktural yang secara konseptual berhasil menyederhanakan siklus politik nasional dan menciptakan efisiensi anggaran negara. Secara teoretis, sistem ini telah meletakkan dasar bagi penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan menyelaraskan momentum pemilihan eksekutif dan legislatif, yang bertujuan meminimalisir potensi hambatan politik dalam

³⁹ Pippa Norris, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 112.

⁴⁰ Titi Anggraini, "Evaluasi Teknis Pemilu Serentak," *Jurnal Demokrasi* 18, no. 1 (2020): 101.

⁴¹ International IDEA, *Electoral System Design Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2017), 98.

⁴² Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 167.

⁴³ Syamsuddin Haris, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2019), 214.

⁴⁴ Marcus Mietzner, *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia* (Singapore: NUS Press, 2013), 178.

⁴⁵ Badan Pengawas Pemilu, *Laporan Pengawasan Pemilu 2019* (Jakarta: Bawaslu, 2020), 84.

⁴⁶ Perludem, *Catatan Evaluasi Pemilu Serentak 2019* (Jakarta: Perludem, 2020), 89.

⁴⁷ Ramlan Surbakti, "Tantangan Kelembagaan Pemilu di Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2020): 148.

proses pengambilan kebijakan antara Presiden dan Parlemen.

2. Peningkatan Partisipasi Kuantitatif

Sistem keserentakan terbukti mampu memusatkan perhatian publik pada satu momentum besar, yang berdampak positif pada peningkatan angka partisipasi pemilih secara kuantitatif. Sentralisasi isu nasional, khususnya pada pemilihan presiden, menjadi daya tarik utama yang mendorong masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

3. Kompleksitas Teknis dan Beban Penyelenggaraan

Di balik efisiensi yang ditawarkan, pemilu serentak menghadirkan tantangan teknis yang sangat kompleks. Beban kerja yang melampaui kapasitas (overload) bagi petugas penyelenggara (KPU dan Bawaslu), mulai dari distribusi logistik hingga penghitungan suara yang memakan waktu lama, menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas dan integritas pelaksanaan pemilu di lapangan.

4. Defisit Kualitas Demokrasi Substantif

Secara substantif, pemilu serentak belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas demokrasi. Terdapat kecenderungan masyarakat terjebak dalam "tsunami politik" di mana rasionalitas pemilih terdistorsi oleh dominasi isu calon presiden. Hal ini mengakibatkan pemilihan anggota legislatif cenderung

terabaikan, yang diperburuk oleh masih maraknya praktik politik uang (*money politics*) serta dominasi partai politik besar yang membatasi keberagaman representasi.

5. Lemahnya Konektivitas Representasi

Meskipun secara prosedural pemilu berjalan lancar, hubungan antara wakil rakyat terpilih dengan konstituennya masih terasa lemah. Sistem serentak cenderung menonjolkan figuritas pemimpin nasional (eksekutif) dibandingkan kedalaman visi-misi calon legislatif, sehingga kualitas representasi politik yang dihasilkan belum optimal dalam menjawab aspirasi masyarakat secara mendalam.

6. Rekomendasi Strategis dan Keberlanjutan

Keberhasilan pemilu serentak di masa depan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk melakukan evaluasi berkelanjutan. Diperlukan perbaikan pada manajemen sumber daya manusia penyelenggara, penguatan edukasi politik pemilih agar lebih rasional, serta reformasi pada regulasi kampanye untuk memastikan bahwa kualitas demokrasi tidak dikorbankan demi efisiensi administratif semata.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Titi. "Evaluasi Demokrasi Elektoral di

- Indonesia." *Jurnal Demokrasi* 19, no. 1 (2021): 70–95.
- — —. "Evaluasi Teknis Pemilu Serentak." *Jurnal Demokrasi* 18, no. 1 (2020): 85–105.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Badan Pengawas Pemilu. *Laporan Pengawasan Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu, 2020.
- Badan Pengawas Pemilu RI. *Evaluasi Pengawasan Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu, 2020.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Politik Indonesia 2020*. Jakarta: BPS, 2020.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Crouch, Harold. *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadiz, Vedi R. "Money Politics and Elections in Indonesia." *Asian Studies Review* 42, no. 3 (2018): 225–240.
- Haris, Syamsuddin. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
- International IDEA. *Electoral System Design Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2017.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Laporan Dampak Kesehatan Petugas KPPS 2019*. Jakarta: Kemenkes RI, 2019.
- Komisi Pemilihan Umum. *Laporan Evaluasi Pemilu 2019*. Jakarta: KPU, 2020.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy: Government Forms*

- and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press, 2012.
- Mietzner, Marcus. *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press, 2013.
- Norris, Pippa. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Perludem. *Catatan Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Perludem, 2020.
- Przeworski, Adam. *Democracy and the Market*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- Surbakti, Ramlan. "Partisipasi Politik dalam Pemilu." *Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 40–55.
- "Sistem Kepartaian dan Representasi Politik." *Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 130–145.
- — —. "Tantangan Kelembagaan Pemilu di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2020): 135–150.
- — —. "Tantangan Pemilu Serentak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 2 (2019): 120–135.
- Supriyanto, Didik. *Pemilu Serentak dan Sistem Presidensial di Indonesia*. Jakarta: Perludem, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Ufen, Andreas. "Party System Institutionalization in Post-Suharto Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 27, no. 1 (2008): 3–34.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014).

Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Arizona State University: SAGE Publications.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.